

Analisis Perbandingan Kinerja Belanja Kabupaten Minahasa Dan Kota Tomohon

Novita A. Saleh¹, Freddy Samuel Kawatu², Nikolas Fajar Wuryaningrat³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: noviesaleh19@gmail.com, kawatufreddy@gmail.com, nikolas.fajar@unima.ac.id

Diterima: 05-12-2020 Disetujui: 26-01-2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja belanja pada pemerintah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon. Bentuk riset ini ialah deskriptif kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder pada Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten Minahasa dan kota Tomohon pada tahun 2017-2019. teknik rasio kinerja belanja pemerintah ialah rasio efektivitas, dan efisiensi. Untuk hasil riset berlandaskan Laporan Realisasi anggaran di BPKAD Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon, secara keseluruhan rata-rata tingkat efektifitas laporan realisasi anggaran di BPKAD Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon kurun waktu periode anggaran 2017 hingga tahun 2019 pada tingkat 80%-90% yaitu efektif. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi rancangan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama tahun anggaran 2017 sampai pada tahun 2019 rata-rata berada pada tingkat >100%, ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi rancangan keuangan kurang efisien. Sebaliknya Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon lebih mengoptimalkan pendapatan/pemasukan dalam menerapkan proyek dan program yang terkait dengan rancangan keuangan dan melakukan skala prioritas dalam penentuan anggaran pembelanjaan didaerah agar sesuai dengan harapan dan tujuan dalam realisasi anggaran daerah.

Kata Kunci: efektivitas, efisiensi, laporan realisasi anggaran

Abstract

This study aims to analyze and compare the spending performance of the Minahasa district and Tomohon district governments. The form of this research is descriptive qualitative. The data needed is secondary data in the Revenue and Expenditure Budget of Minahasa Regency and Tomohon City in 2017-2019. The performance technique for government spending is the ratio of effectiveness and efficiency. For research results based on the budget realization report at BPKAD Minahasa Regency and Tomohon City, the overall average level of effectiveness of the report is at the level of 80%-90%, which is considered effective. Whereas overall the average level of financial design efficiency in the Regional Financial and Revenue Management Agency during the 2017 to 2019 fiscal year is on average 100%, this indicates that the level of efficiency of the financial design is lower. On the other hand, the Minahasa District and Tomohon Municipal Governments further optimizes revenue / income in implementing projects and programs related to financial design and carry out priority scales in determining regional expenditure budgets to match expectations and objectives in the regional budget realization.

Keywords: effectiveness, efficiency, budget realization reports.

PENDAHULUAN

Dalam hal pengelolaan daerah secara mandiri otonomi daerah sampai hari ini telah memberikan sumbangsi yang amat besar tanpa menyandarkan kepada pemerintah pusat secara lengkap. Dalam membandingkan dan mengkaji kemampuan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang amat penting bagi keuangan daerah itu sendiri. UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 yang sudah diperbaharui tercantum secara terperinci oleh suatu otonomi daerah di negara Indonesia. Pelaksana wilayah memiliki hak memperoleh kekuasaan otonom wilayah secara jelas didalam Undang-undang tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan kinerja desentralisasi (Saputra, 2014). Finansial wilayah bisa diterjemahkan satu tatanan hak dan kewajiban, yang mana kewajiban dan hak tersebut dapat serupa dengan uang maupun seluruh wujud substansi, baik berupa barang ataupun uang yang mengharuskan bisa dikerjakan selaku basis pada aset satu wilayah selama uang ataupun barang tersebut belum dimiliki atau dimiliki bagi negara, wilayah, pihak lain yang sebenarnya mempunyai wewenang teratas berbanding bersama tatanan didalam satu peraturan yang beraku hingga kini. (Halim & Kusufi, 2012: 25).

Batas waktu didalam membelanjakan nilai maupun harta yang digunakan dalam melunasi maupun mendanai satu wilayah tersebut didalam konsep akan melaksanakan satu manfaat wilayah berupa pembangunan, bantuan pada rakyat maupun menumbuhkan kemampuan ekonomi wilayah merupakan tugas pada bagian keuangan daerah. Mengenai kewajiban serta hak memiliki perannya tiap-tiap didalam aktivitasnya. (Kuswadi, 2017).

Menaksir kinerja honorarium wilayah bisa menyuguhkan pemberitahuan yang amat berguna dalam menimbang apabila Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dipublikasikan oleh pemerintah daerah. LRA menanti pengutamaan yang sangat utama dibanding neraca, serta LRA ini yakni bentuk berita honorarium wilayah yang sangat pertama diwujudkan mula membentuk berita timbangan, laporan arus kas beserta berita operasional. Tumpuan penanganan pelaksana serta penyusunan wilayah merupakan rencana keuangan pada pemerintah. Tugas utama dari anggaran yaitu seumpama alat distribusi dan stabilisasi. Penyediaan tenaga kapasitas umum, diplomasi serta penanganan wadah juga menilai usaha. Maka karenanya, LRA merupakan satu diantara laporan pertanggungjawaban keuangan wilayah yang dinilai paling penting. Berlandaskan LRA itu, pembuat rancangan bisa melahirkan rancangan keuangan berbentuk penguraian honorarium, analisis pembiayaan dan penguraian pendapatan. (Mahmudi, 2010).

Berdasarkan prosedurnya, bahwa apabila jumlah realisasi belanja lebih kecil dari pada anggarannya akan menimbulkan angka nominal baik mengalami kenaikan maupun penurunan sehingga menimbulkan konvensional ketidaklarasan didalam teknik taksiran dalam pengaktualannya. Karnanya perlu kita mengetahui perbandingan kinerja belanja dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi guna melihat manakah yang lebih baik dalam pengelolaan Realisasi Anggaran.

DPRD mempunyai wewenang selaku dewan legiaslatif serta dapat menetapkan atau mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bias kelak dapat tercapai pada pelaksana sebagai pihak eksekutif wilayah yang dibentuk berdasarkan persetujuan tersebut. Yang mengontrol DPRD akan menimbang upaya pelaksana yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan berupaya mempertanggungjawabkan pada pelaksana selama menjalankan Taksiran Penghasilan serta Honorarium Wilayah yang sebenarnya sudah dibahas lalu disampaikan pada DPRD dalam format Taksiran Pengeluaran Pemasukan serta honorarium wilayah (Mahmudi, 2010).

Setelahnya dikembangkan berlandaskan pengukuran upayah honorarium demi memperoleh nilai presentase yang karenanya bisa seumpamanya nilai pada penelusuran pengukuran honorarium kurun waktu pelaksana Kota Tomohon serta Kabupaten Minahasa.

Akan menganalisis perbandingan kinerja belanja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Dan Kota Tomohon lewat beberapa indikator yaitu Efektivitas dan Efisiensi pada tahun anggaran 2017-2019.

Arahan menyediakan data kongkretisasi penghasilan, surplus/defisit, belanja, pembiayaan, pengiriman dan sisa lebih/kurang pengelolaan anggaran, yang tiap-tiap dibandingkan agar taksirannya selama satu tahun merupakan maksud dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). serta menyediakan ikhtisar sumber, distribusi, dan pemakaian essensial honorarium yang di tata oleh pelaksana pusat/daerah, kemudian mengilustrasikan komparasi kurun waktu taksiran serta pengaktualan selama satu tahun atas laporan realisasi anggaran tersebut.

Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah agenda keuangan tahunan wilayah yang dibahas dan disetujui serentak, dan akan didelegasikan melalui PERDA (Permendagri No.13 Tahun 2006). Radas yang dipakai menjadi media dengan maksud dalam peningkatan jasa umum dan rakyat di daerah pengertian dari APBD. Kapabilitas setiap wilayah sesuai dengan idiosinkrasi dan kesanggupan tersendiri inilah yang memicu penerapan APBD untuk menggambarkan kebutuhan yang ada.

Akan menyurvei mungkinkah pelaksana wilayah sudah pernah memnfaatkan APBD secara ekonomi, kedayagunaan dan ampuh (*value for money*) diperlukannya penjabaran kapasitas honorarium wilayah sebab sangat penting dilakukan. Selama ini pelaksana wilayah sudah menjalankan kedayagunaan taksiran, mengatasi pengurangan yang belum tepat sasaran serta pengurangan yang belum semestinya. Jika taksiran honorarium kian kecil pada besaran yang ditaksirkan peristiwa ini memperlihatkan bahwa kedayagunaan belanja terhadap kinerja taksiran honorarium wilayah akan dinilai baik. Pentingnya menganalisis guna untuk memperoleh informasi mengenai pengeluaran pemerintah daerah yang terikat beserta guna taksiran selaku penyaluran, jatah serta pemantapan dalam hal ini honorarium wilayah. Rancangan usaha aktivitas pelaksana wilayah yang disuguhkan didalam model nilai serta memberitahukan bahwa pokok perolehan serta membentuk acuan minimal serta kewajiban yang membentuk target maksimal demi satu periode taksiran definisi dari APBD (Halim, 2012 :10).

Bantuan kurun waktu penguangan beserta target ataupun tuntutan yang akan diperoleh adalah kegunaan (hasil guna) menurut (Mahmudi, 2011: 22). Pencapaian tujuan atau paket kebijakan pada dasarnya berhubungan dengan pengertian efektivitas ini. Operasional akan dimaksudkan berhasil bilamana upayah tindakan tercatat memperoleh target ataupun tuntutan aktif strategi.

Ikatan kurun waktu pengeluaran serupa bahan ataupun bantuan akan dihasilkan bersama asal kapabilitas akan dimanfaatkan demi menciptakan pengeluaran demikian terkait dengan efisiensi (Mahmudi, 2011 :22). Situasi serta kejadian, didalam menyelesaikan satu tugas dilakukan beserta kebenaran dan penuh kapabilitas yang dipunyai menggambarkan definisi yang dikemukakan oleh "(Raharjo, 2011 :169). Sedangkan selaku matematis, kedayagunaan ialah kesetaraan atas pengeluaran dan pemasukan beserta dengan maksud lain output per unit input.

Penelitian Terdahulu

Karinda (2013) dengan judul Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari kelima analisis yang digunakan, bahwa anggaran belanja pada BPK-BMD Prov. Sulut sudah baik dan mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup baik.

Faqihudin (2013) dengan judul Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik, formula yang dilakukan ialah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari kelima analisis yang digunakan menunjukkan bahwa penggunaan anggaran menunjukkan angka positif. Namun, Pemerintah Kota Tegal masih memberikan porsi yang besar bagi belanja operasi dibandingkan belanja modal sehingga belanja modal masih termasuk rendah.

Pangerapan (2016) dengan judul Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran (TA) 2012-2014, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungannya, Pemerintah Kabupaten Minahasa sudah menggunakan anggaran secara efisien dan efektif.

METODE

Jenis hasil dipakai didalam riset ini ialah hasil inferior berbentuk neraca yang didalam riset ini memetik data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), karenanya pengarang mengerjakan riset kontan di tempat riset akan memperoleh hasil serupa Laporan Realisasi anggaran dan akan dianjurkan oleh pustaka acuan telah sesuai beserta faktor-faktor telah diuji. Sumber hasil selama riset ini yaitu bersumber dari BPKAD Kabupaten Minahasa dan yang menjadi sampel dari riset ini yaitu berupa Rincian Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019.

Tempat Riset dilaksanakan Di badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon. Riset tersebut dikerjakan mulai pada bulan januari hingga bulan agustus. Pemantauan berjalan (pemeriksaan), yakni metode akumulasi hasil yang mana pengarang berjalan ke tempat kantor pelaksana serta memonitor acara yang dikerjakan kantor pelaksana demikian. Konsultasi, yakni mengerjakan bertatap serta diskusi perbincangan berjalan bersama iringan yang berkewajiban terhadap urusan yang diobservasi. Prediksi formalitas maupun strategi-strategi yang dikerjakan kantor pelaksana.

Teknik yang dipraktekkan dalam penelitian ini ialah penguraian seadanya. Dimana menggunakan pengukuran kedayagunaan serta pengukuran tepat guna.

Kedayagunaan terikat pada tautan kurun waktu nilai yang ditumpukan pada nilai yang sebenarnya terlaksana, serta efektivitas ialah tautan kurun waktu pengeluaran beserta acuan. Meluap hebat sumbangsi pengeluaran kepada perolehan maksud maka meluapkegunaan wadah, strategi, maupun urusan. Kedayagunaan banyaknya mementingkan kepada nilai yang terlaksana. (Mahmudi, 2007).

Yang mengukur jenjang kedayagunaan adalah sesuai teknik seumpama rancangan keuangan langsung sesuai maksud taksiran honorarium langsung.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2007)

Berlandaskan formula tersebut bisa disimpulkan maka tujuan outcome pada riset ini ialah Realisasi Anggaran Belanja serta output adalah Target Anggaran belanja. Selanjutnya barometer efektivitas honorarium kontan

Barometer jenjang kedayagunaan taksiran honorarium dilihat menurut ketentuan Kemendagri No.690.900-327 tahun 1996, yaitu :

1. Apabila nilai kesetaraan kian dari 100%, hingga taksiran honorarium disebutkan sangat efektif.
2. Apabila nilai perolehan kurun waktu 90%-100%, hingga taksiran honorarium disebutkan efektif.
3. Apabila nilai perolehan kurun waktu 80%-90%, hingga taksiran honorarium disebutkan cukup efektif.
4. Apabila nilai perolehan kurun waktu 60%-80%, hingga taksiran honorarium disebutkan kurang efektif.
5. Apabila nilai perolehan kurang dari 60%, hingga taksiran honorarium disebutkan tidak efektif.

Rumusan ini masih relevan dalam pengukuran kinerja belanja daerah dan masih menjadi acuan dalam pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi laporan realisasi anggaran.

Hubungan erat dengan konsep produktifitas merupakan tepat guna berdasarkan Mardiasmo (2009). Penaksiran tepat guna dikerjakan sesuai menjalankan perbedaan kurun waktu output dengan menghasilkan mengenai input yang kerjakan (biaya output). Satu barang ataupun nilai usaha spesifik telah didapatkan dengan penerapan essensial pada proses kegiatan operasional. Untuk mengetahui perkembangan belanja diperlukannya analisis pertumbuhan belanja yang bermanfaat menurut Mahmudi (2007).

Jenjang tepat guna dapat ditakat melalui perbandingan keseluruhan taksiran honorarium berjalan sesuai jumlah rancangan keuangan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2007)

Berlandaskan formula tersebut diketahui kalau yang ditujui output pada riset ini ialah capaian rencana keuangan serta input ialah taksiran honorarium. Selanjutnya ialah barometer nilai penjumlahan pada tepat guna honorarium berjalan :

Barometer jenjang tepat guna rencana keuangan berlandaskan pada ketetapan Kemendagri No.690.900-327 tahun 1996, yaitu :

1. Apabila nilai kesetaraan kian dari 100%, hingga taksiran honorarium disebutkan tidak efisien
2. Apabila nilai perolehan kurun waktu 90%-100%, hingga disebutkan kurang efisien.
3. Apabila nilai perolehan kurun waktu 80%-90%, hingga disebutkan cukup efisien.
4. Apabila nilai perolehan kurun waktu 60%-80%, hingga taksiran honorarium disebutkan efisien.
5. Apabilai nilai perolehan kurang dari 60%, hingga taksiran honorarium disebutkan sangat efisien.

Uji Beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standart error dari perbedaan rata-rata dengan standart error dari perbedaan rata-rata dua sampel atau dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut. Standart error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara normal. Dapat disimpulkan bahwa uji beda t-test adalah membandingkan rata-rata dua grub yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berlandaskan bukti riset telah dilaksanakan, sehingga pengarang bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk telah dibutuhkan ialah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon. Hasil yang didapatkan ialah Rancangan Keuangan selama tahun 2017-2019, Rancangan Keuangan Biasa, Acuan perolehan serta Taksiran Perolehan Dibadan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon 2017-2019.

Tabel 1.1 Kedayagunaan Rancangan Keuangan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2017-2019.

Tahun Anggaran	Realisasi Anggaran Belanja (Outcome)	Target Anggaran Belanja (Output)	Persentase (%)	Keterangan
2017	23.580.374.311	23.104.815.892	102,05%	Sangat Efektif
2018	22.531.265.590	28.493.141.824	79,07%	Kurang Efektif
2019	21.269.675.517	21.936.138.564	96,9%	Efektif

Sumber : Data Olahan 2020

Didalam akumulasi penjumlahan itu, kemudian ukuran kedayagunaan Rancangan Keuangan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2017 berupaya berjumlah 102,05% berada pada tingkat sangat efektif, dan tahun 2018 mendapatkan penurunan berada pada jumlah 79,07% yang berarti Kurang Efektif sedangkan mengalami kenaikan pada tahun 2019 berada pada tingkat 96,9% yang artinya Efektif.

Tabel 1.2 Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2017-2019.

Tahun Anggaran	Realisasi Anggaran Belanja (Outcome)	Target Anggaran Belanja (Output)	Persentase (%)	Keterangan
2017	23.566.098.907	21.736.077.000	108,41%	Sangat Efektif
2018	26.614.819.966	33.213.521.491	80,13%	Cukup Efektif
2019	26.476.369.055	51.557.319.597	51,35%	Tidak Efektif

Sumber : Data Olahan 2020

Pada akumulasi penjumlahan itu, lalu ukuran kedayagunaan Rancangan Keuangan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan serta Pendapatan Daerah Kota Tomohon pada tahun 2017 berada pada jumlah 108,41% berada pada tingkat sangat efektif, dan tahun 2018 berada pada jumlah 80,13% yang berarti Cukup Efektif Efektif sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan berada pada tingkat 51,35% yang artinya Tidak Efektif.

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan penilaian perumpamaan kurun waktu manifestasi eliminasi elementer serta manifestasi pemasukan merupakan satu daya guna. meluap rendah pengukuran daya guna, akan meluap bagus, saat itu pula sebaliknya.

Tabel 1.3 Tepat Guna Rancangan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2017-2019.

Tahun Anggaran	Target Anggaran Belanja (Output)	Anggaran Belanja (input)	Persentase (%)	Keterangan
2017	27.364.147.236	23.580.374.311	116,04%	Tidak efisien
2018	25.582.854.059	22.531.265.590	113,54%	Tidak efisien
2019	24.849.055.725	21.269.675.517	116,82%	Tidak efisien

Sumber : Data Olahan 2020

Tabel 1.4 Efisiensi Rancangan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2017-2019.

Tahun Anggaran	Target Anggaran Belanja (Output)	Anggaran Belanja (input)	Persentase (%)	Keterangan
2017	25.826.420.375	23.566.098.907	109,59%	Tidak efisien
2018	27.820.138.141	26.614.819.966	104,52%	Tidak efisien
2019	28.790.113.486	26.476.369.055	108,73%	Tidak efisien

Sumber : Data Olahan 2020

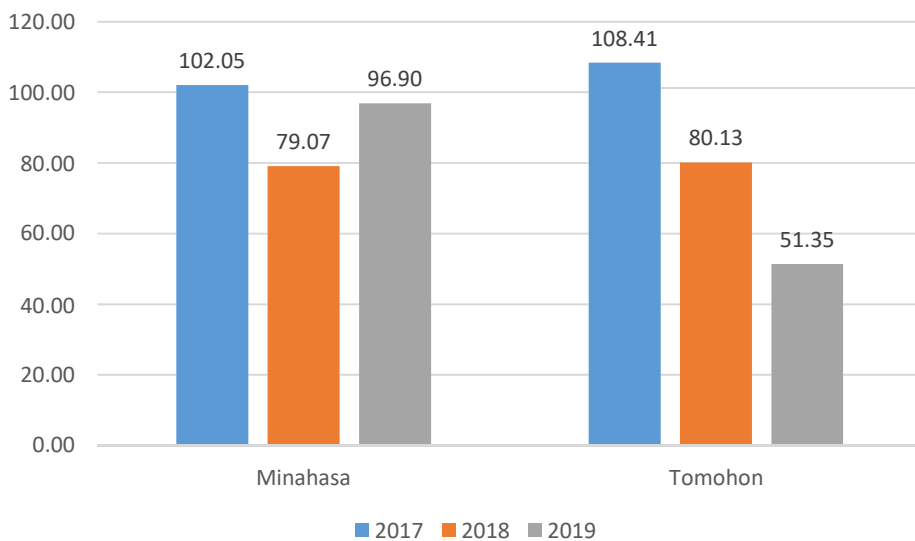
Jenjang kedayagunaan rancangan keuangan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon.

Dari akumulasi penjumlahan itu, kemudian ukuran kedayagunaan rancangan keuangan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2017 berupaya asal jumlah 102,05% berada pada tingkat sangat efektif, dan tahun 2018 mendapatkan penurunan berupaya asal jumlah 79,07% yang berarti kurang efektif sedangkan mengalami kenaikan pada tahun 2019 berada pada tingkat 96,9% yang artinya Efektif. Dan dari akumulasi penjumlahan tersebut, akan ukuran kedayagunaan Rancangan Keuangan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon pada tahun 2017 berada pada jumlah 108,41% berada pada tingkat sangat efektif, dan tahun 2018 berada pada jumlah 80,13% yang berarti Cukup Efektif Efektif sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan berada pada tingkat 51,35% yang artinya Tidak Efektif. Menjadi tepat guna jika pengukuran telah tercapai besar pada 100% maupun meluap jauh pengukuran kedayagunaan, menjelaskan kekuatan wilayah meluap hebat. Oleh karenanya selaku keutuhan bisa dibagikan perumusan lalu jenjang kedayagunaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2017-2019 umumnya berupaya dijenjang 90% lebih yakni berupaya dijenjang tepat guna. Dan pada Kota Tomohon dari tahun 2017-2019 umumnya berada pada tingkat 80% yakni berupayah dijenjang Cukup tepat guna. Kemudian mendapatkan penyusutan pada tahun 2018 jenjang efektifitas rancangan keuangan dengan kategori Kurang Efektif untuk Kabupaten Minahasa, sedangkan untuk Kota Tomohon mengalami penurunan bahkan sampai Tidak efektif ditahun terakhir. Maka setelahnya ditahun kedepan pemerintah daerah atau terlebih khusus Dibadan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon. Agar mampu mempertahankan tingkat efektivitas Rancangan Keuangan.

Jenjang efisiensi rancangan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon.

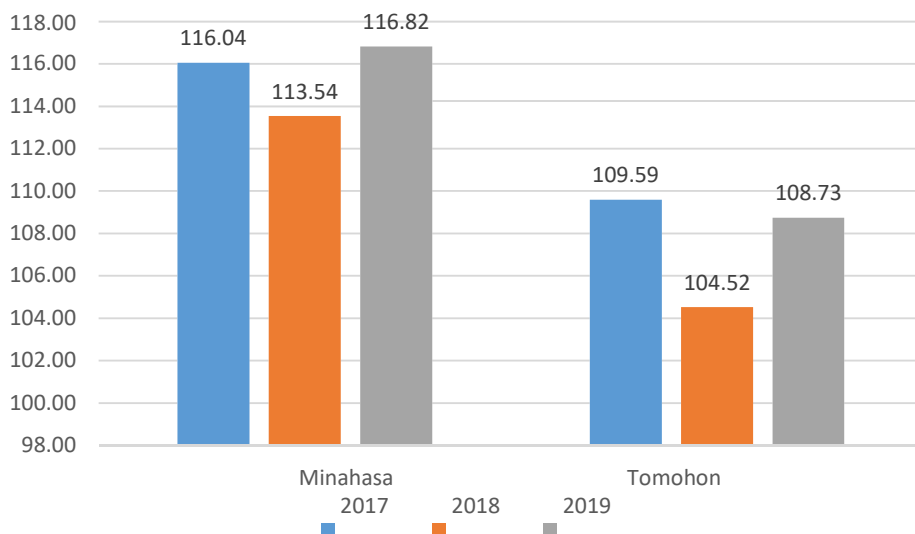
Pada nilai penjumlahan diatas ditabel 1.3 serta tabel 1.4, lalu jenjang tepat guna rancangan keuangan kepada Dibadan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon ditahun 2017-2019 tidak Efisien. Karnanya selaku keutuhan bisa dipersembahkan pertimbangan pada jenjang tepat guna Dibadan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon dari tahun 2017-2019 biasanya berupayah dijenjang >100% maksudnya Tidak tepat guna atau belum baik tepat guna.

Uji beda dengan menggunakan uji T untuk menggambarkan hasil rasio efektivitas dari tabel diatas mengenai target anggaran belanja dan anggaran belanja sesuai, maka hal ini dibuatlah uji T agar hasil yang didapatkan dari tabel diatas benar adanya. Uji T digunakan untuk melihat perbandingan antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dengan kota tomohon lebih efektivitas yang mana antara keduanya. Nilai diperoleh dari perhitungan pada tabel yang tercantum diatas



Berdasarkan uji beda rata-rata (uji t) diperoleh temuan penelitain bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan Efektivitas Rancangan Keuangan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah antara kota minahasa dan kota tomohon.

Uji beda dengan menggunakan uji T untuk menggambarkan hasil rasio efisiensi dari tabel diatas mengenai target anggaran belanja dan anggaran belanja sesuai, maka hal ini dibuatlah uji T agar hasil yang didapatkan dari tabel diatas benar adanya. Uji T digunakan untuk melihat perbandingan antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dengan kota tomohon lebih efisiensi yang mana antara keduanya. Nilai diperoleh dari perhitungan pada tabel yang tercantum diatas.



Berdasarkan uji beda rata-rata (uji t) diperoleh temuan penelitin bahwa terdapat perbedaan yang signifikan Efisiensi Rancangan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah antara kota minahasa dan kota tomohon.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Laporan Realisasi Anggaran akan dipahami bahwa tingkat perhitungan efektivitas dan efisiensi rancangan keuangan dibadan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah memakai rumus, yakni pengukuran seumpama serta dikasih pertimbangan jika memakai pedoman pertimbangan, rasio efektivitas dan rasio efisien pada laporan realisasi anggaran dibadan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten minahasa dan kota tomohon dari tahun 2017-2019.

Ukuran efektifitas laporan realisasi anggaran dibadan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten minahasa dan kota tomohon dari tahun 2017-2019 dapat disimpulkan tepat guna ketika menjalankan strategi serta urusan di rancangan keuangan.

Ukuran tepat guna rancangan keuangan dibadan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten minahasa dan kota tomohon pada tahun 2017-2019 tidak Efisiensi dalam penggunaan laporan realisasi anggaran. Saran yang dapat diberikan peneliti pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon agar bisa dikembangkan terutama keterbukaan diwaktu kemudian, karnanya bisa menyerap pembuangan wilayah untuk beragam keperluan riil rakyat berdasarkan suaranya. Diusulkan bagi pengarang setelahnya, untuk menjadikan pedoman serta penganalisis menawarkan untuk pengarang setelahnya bisa menyusun rancangan keuangan perperiode berjalan serta menyusun mengenai teknik berjalannya strategi sasaran serta strategi usaha rancangan keuangan telah dikerjakan berdasarkan pada aturan yang telah disahkan sama Pemerintah Wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

DORI SAPUTRA. (2014). *Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat.*

- Faqihudin, M. (2013). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik. *Permana*, 4(2).
- Karinda, C. Y., Ilat, V., & Mawikere, L. (2013). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Accountability*, 2(2), 73. <https://doi.org/10.32400/ja.3689.2.2.2013.73-84>.
- Kuswadi, S. (2007). Kendali Cerdas, Teori dan Aplikasi Praktisnya. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lontaan, I. C., Pangerapan, S., Sam, U., & Manado, R. (2014). Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014 *Analysis of Regional Expenditure in Minahasa Local Government Fiscal*. 4(1), 898–906.
- Meylani. (2016). Daftar Pustaka Daftar Pustaka. *Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Aliran*, 20(5), 40–43. https://books.google.co.id/books?id=D9_YDwAAQBAJ&pg=PA369&lpg=PA369&dq=Prawirohardjo,+Sarwono.+2010.+Buku+Acuan+Nasional+Pelayanan+Kesehatan++Maternal+dan+Neonatal.+Jakarta+:+PT+Bina+Pustaka+Sarwono+Prawirohardjo.&source=bl&ots=riWNmMFyEq&sig=ACfU3U0HyN3I
- Permendagri. (2006). *Permendagri No.13/2006*. 1–73.
- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 5(2), 745–752.
- Sistem, I., Sektor, A., Jakarta, P., Empat, S., Yunitha, M., Dana, P., Umum, A., Indeks, T., Andrea, F., & Adi, H. (2011). *DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2006. 2009–2011*.
- Untari, R. (2015). Analisis efisiensi dan efektifitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung dinas pendidikan kota semarang. *UniversitasDian Nuswantoro: Semarang*.